



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AgusSalim No. 1 KodePos 25651

Telp. (0756) 21301 Fex. 22070

PAINAN

MASA SIDANG : I
TAHUN SIDANG : 2020
RAPAT KE : 4
JENIS RAPAT : Rapat Konsultasi

RISALAH RAPAT KONSULTASI PIMPINAN DPRD, KETUA FRAKSI DAN KETUA KOMISI DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN

Jenis Rapat : Rapat Konsultasi

Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 28 April 2020
Waktu : Pukul 10.¹⁵ Wib s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Selatan

Pimpinan Rapat : **ERMIZEN, S. Pd**
SekretarisRapat : **JARIZAL, SE**

Acara : Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD, Ketua Fraksi, Ketua Komisi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Percepatan Penyesuaian APBD dalam rangka Penanganan Covid-19 di Kabupaten Pesisir Selatan dengan Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

I. Rapat di hadiri

PimpinandanAnggota DPRD KabupatenPesisir Selatan :

1. Ermizen, S. Pd : Ketua
2. Hakimin, SH : Wakil Ketua
3. Jamalul Yatim : Wakil Ketua
4. Jarizal, SE : Sekretaris/bukan Anggota
5. Novermal, SH : Ketua Fraksi PAN
6. Darwiadi, SH : Fraksi PAN
7. Aljufri, SH, MH : Ketua Fraksi NasDem
8. Feby Rifly, SH : Ketua Fraksi PKS
9. Drs. Jamalul, MM : Fraksi PKS
10. Hanafi Herman, S. Pt : Ketua Fraksi Demokrat
11. Syafril Saputra, SH : Ketua Fraksi GOLKAR
12. Dedi Rahmanto Putra, S.IP : Wakil Ketua Fraksi GOLKAR
13. Rahman, S. Ag : Ketua Fraksi Bintang Karya Bangsa
14. Julianavia, SH, M.Si : Ketua Fraksi Persatuan Pemb. Hati Rakyat Indonesia
15. Drs. Daskom, M. Pd : Ketua Komisi/Fraksi PDIP
16. Ermiwati, SE : Sekretaris Fraksi GOLKAR
17. Yuslimardan, A. Md : Fraksi Bintang Karya Bangsa/Ketua Komisi II
18. Alkisman Nurman, S. IP : Fraksi Bintang Karya Bangsa/Ketua Komisi II

II. Tim Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

1. Hamdi, S. Pt, M.Si : Asisten III
2. Mimi Riarti, SE. Akt : Asisten II
3. Yoski Wandri, S. Pt, M.Si : Ka. Bappedalitbang
4. Suhandri, SE, MM : Ka. BPKD
5. Dasrianto Putra, S. Sos, M.Si : Ka. Badan Pendapatan
6. Afrizal Umari, M.Si : Kabid Bappedalitbang
7. Subchandri : Sekretaris BPKD
8. Tuty : Kabid Anggaran

III. Sekretariat DPRD Kab. Pesisir Selatan

1. Mulyadi M., AP, M.Si : Kabag Persidangan dan Risalah
2. Ikhsan Busra, SH : Kabag Hukum dan PerUndang-Undangan
3. Pris Derika Habdi, SH : Kabag Umum
4. Rahmi Hayati, SH : Kabag Keuangan
5. EdmonDantes, SE, MM : KasubagPersidangan
6. Abadi Jaya, S.SosI, M.Si : Kasubag Risalah
7. Daswandi, A. Md : Kasubag Humas dan Protokoler

IV. JalannyaRapat

Pimpinan Rapat (Ermizen, S. Pd)

Penghormatan pimpinan kepada hadirin yang hadir.

Ucapan puji syukur kepada Allah SWT, dan selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW.

Pesan Pimpinan sebagai berikut :

- ✓ Dengan mengucapkan "**Bismillahirrahmanirrahim**" Pimpinan membuka rapat Jam 10.⁵⁵ Wib dengan ketukan palu 3 (tiga) kali.
- ✓ Untuk mengawali rapat dengar pendapat ini kami DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ingin mengetahui tentang anggaran yang telah dilakukan pergeseran terhadap APBD Tahun Anggaran Tahun 2020. Selanjutnya dipersilahkan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menyampaikannya.

Hamdi, S. Pt, M.Si (Asisten III Setda Kab. Pessel)

- ✓ Anggaran pengurangan sebanyak 10 % sedangkan APBD telah dihabis untuk belanja pegawai 65 % sehingga tinggal 25 % untuk alokasi anggaran pembangunan jalan keluarnya maka dilakukan pengurangan terhadap anggaran SKPD untuk Covid-19.
- ✓ Kegiatan yang tertunda akibat covid19 ada sekitar 60 % terhitung kontrak tanggal 6 April.
- ✓ Belanja modal pengurangan 60 %, yang idealnya 80 % tetapi karena kegiatan sudah dikontrakan sehingga terpaksa rasionalisasi 60 %.
- ✓ Untuk Covid-19 diperkirakan anggaran 20 milyar dan itu masih ada penambahan pengusulan dan itu masih belum bisa dipenuhi. Jaringan pengaman sosial sediakan 1600 KK untuk 600.000/bulan. Untuk penanganan ekonomi masyarakat.

Syafril Saputra, SH

- ✓ Kondisi sekarang kita ingin tahu dulu berapa kebutuhan daerah untuk kebutuhan Covid-19 dan juga kami minta presentasi kepada kami OPD mana yang dilakukan pemotongan anggaran atau digeser anggarannya dan kegiatan lain seperti belanja modal termasuk anggaran yang ada disetwan, Bappedalitbang dan BPKD.

Yoski Wandri, S. Pt, M. Si (Ka. Bappedalitbang)

- ✓ Untuk penyesuaian anggaran ada dua yang kita sesuaikan 1. Dana transfer ke daerah 1.479.323. triliun setelah keluar 1.265.557.235.746.- triliun berkurang 173.570.996.577. milyar dan Pendapatan lain ada peningkatan 5 milyar.

- ✓ Kebutuhan Covid-19 gugus tugas sekitar 14.587.860.269 dan untuk alat perlindungan diri yang dinas kesehatan dan rumah sakit.
- ✓ Penanganan sosial 16.000 KK, diberi 1.00.000.-/bulan arahan pusat bantuan tersebut tidak boleh timpang tindih. 80.000.- KK di Pesisir Selatan.
- ✓ Ada 2.5 milyar untuk penanganan ekonomi yang ditarok belanja tidak terduga karena Covid-19 ini belum bisa diprediksi kapan berakhirnya. Anggaran yang masih dicari sekarang ini 219 milyar dan ini akan dilakukan lagi pengurangan anggaran OPD dari belanja rutin, belanja modal. Dan kalau anggota DPRD ingin tahu maka kita akan tampilkan RKA 22 setiap OPD jika dibutuhkan.

Novermal, SH

- ✓ Pada rapat ini disamping Tim Pemerintah Daerah menampilkan slide juga diminta memberikan foto copi pergeseran sehingga kita dapat membaca dan minta aksi plan penanganan Covid-19 seperti apa anggarannya termasuk kegiatan Sekretariat DPRD yang dipangkas dan anggaran OPD.

Dedi Rahmanto Putra, S. IP

- ✓ Devisit anggaran untuk Covid-19 yang berakibat pada pengurangan transfer pusat ke daerah dan pendapatan sekitar 5 milyar, dana rill yang digunakan untuk Covid-19 sebanyak 219 milyar dan kurang pemotongan pusat sekitar 46 milyar.
- ✓ Pergeseran anggaran yang dilakukan oleh TAPD sesuai aturan sekitar 46 milyar yang diambil dari anggaran OPD. Dan kemana saja yang akan dipergunakan anggaran tersebut dan lebih lanjut lebih teknis nanti Komisi IV akan bahas dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PP dan Perlindungan Anak. Maka minta penjelasan secara rinci setiap OPD yang dilakukan pemotongan.

Yoski Wandu, S. Pt, M. Si (Ka. Bappedalitbang)

- ✓ Pada pembahasan anggaran, kita dapat transfer anggaran dari pusat DAU dan anggaran tersebut sudah dibagi habis terhadap kegiatan yang ada pada OPD. Potongan 176 milyar pemotongan 46 milyar tetapi pemotongan 267 milyar. Namun ada kegiatan yang sudah terkontrak diupayakan dilanjutkan pekerjaannya dan pekerjaan pasar sebagian besar terpotong lebih rinci terdapat pada RKA 22 OPD.

Dedi Rahmanto Putra, S. IP

- ✓ Dana transfer diputuskan 219 milyar sebenar bisa kita atur dan lihat RKA 22 pada kegiatan OPD kegiatan mana yang saja dilakukan pemangkasan dan kita ingin mendapat gambaran pada TAPD dan kegiatan saya kira dan informasi yang kami dapat ada sekitar 50 % kegiatan yang terkontrak dan ada juga kegiatan yang dipaksakan untuk dikontrakan sementara pikir anggota DPRD sebagian besar tidak terlaksana.
- ✓ Pengurangan ini kan juga bisa diambilkan dari akres dirasionalkan karena kami anggota DPRD juga punya janji dengan konstituen untuk itu jangan tumpang pilih terhadap pemotongan dan pemangkasan anggaran ini kami harus dilibatkan tetapi kalau tidak biar TAPD saja yang mengatur APBD ini.

Syafril Saputra, SH

- ✓ Kita mencari anggaran 219 milyar dari angka ini apakah sudah angka pasti atau masih ada penambahannya. Terhadap kegiatan yang terkontrak saya lihat kontrak ada di atas tanggal 9 April 2020 apakah ini tidak bisa dilanjutkan atau dibayarkan karena dengan anggaran 200 juta dari awal kalau memang bisa diselamatkan kita selamatkan karena kontraktor banyak orang yang bisa hidupnya dari kontraktor. Kapan perlu kegiatan yang jalan agar ditinjau kelapangan dan pekerjaan yang dibayar sesuai dengan bobot pekerjaan yang dilaksanakan.

Alkisman, S. IP. Dt. Rajo Indo

- ✓ Untuk pikir anggota DPRD apakah masih utuh atau bagaimana. Kegiatan yang terkontrak diusahakan pencairan pada rapat ini kita perlu jawaban dan kepastian. Terhadap pemotongan dan pergeseran itu agar disampaikan ke DPRD.
- ✓ Ada anggaran hibah dan bansos tidak dilaksanakan termasuk kegiatan fisik anggota DPRD agar dijelaskan sehingga anggota DPRD tidak selalu bertanya dan bertanya. Hasil tinjau lapangan banyak desakan untuk bantuan kepada masyarakat.
- ✓ Maka pada rapat ini agar jawaban TAPD yang pasti dan sehingga tidak ada pertanyaan lagi bagi kami anggota DPRD.

Dedi Rahmanto Putra, S. IP

- ✓ Pokir anggota DPRD sekitar 25 milyar, bagaimana untuk APBD 2020 ini bisa diamankan karena pikir ini mengarah pada bantuan sosial dan hibah sehingga kewajiban kami dengan konstituen dapat kami amankan untuk konstituen.

Hamdi, S. Pt, M.Si (Asisten III Setda Kab. Pessel)

- ✓ Pengurangan itu sudah aturan dari pusat untuk pemotongan dan pembayaran pekerjaan yang dilaksanakan sekarang ini kita sedang negosiasi dengan pihak ketiga apakah bisa kegiatan lanjut tetapi 2021 dibayar. Untuk pikir anggota DPRD ini agar anggota DPRD masing-masing bertanya pada OPD terkait.

Dedi Rahmanto Putra, S. IP

- ✓ Pemangkasan itu seperti apa, apakah dari angka yang ada dari seluruh kegiatan pembangunan yang ada pada APBD atau bagaimana. DPRD hanya minta pikir anggota DPRD diamankan. Tetapi kalau main pangkas, potong rata atau pangkas saja semua kegiatan pembangunan termasuk pembangunan kantor perwakilan di Tapan dan pembangunan mesjid terapung sehingga tidak ada tumpang tindih.

Alkisman, S. IP. Dt. Rajo Indo

- ✓ Agar dijelaskan belanja modal dan belanja barang/jasa yang dipotong, terhadap pikir anggota DPRD yang belum dikerjakan oleh OPD, kalau kami anggota DPRD yang tanya pada OPD pada hal kami anggota DPRD dapat telpon dari kepala OPD bahwa pikir sudah dipotong dan kepala OPD minta tanyakan pada BPKD tentang pemotongan pikir, maka kami minta marilah kita transparan dalam pelaksanaan APBD ini. Sebab saya lihat sudah sangat luar biasa Pokir untuk mesjid masih dipersulit oleh BPKD untuk pencairannya kemarin ada masyarakat yang menyampaikan kepada kami pada hal uangnya sedikit.

Dedi Rahmanto Putra, S. IP

- ✓ Saya minta dijawab ini oleh TAPD apakah pikir anggota DPRD bisa di amankan pada APBD tahun 2020 ini.

Jamalus Yatim

- ✓ Melihat kondisi rapat hari ini saya lihat rapat ini tidak ada endingnya, untuk Covid-19 ada masyarakat yang pulang kampung sebanyak 16 orang di Kecamatan Linggo Sari Baganti tidak ada diperiksa sementara gugus sibuk rapat-rapat, saya kira sekarang ini DPRD perlu buat surat bahwa DPRD tidak mau tahu dengan APBD Tahun Anggaran 2020.
- ✓ Pada rapat sebelumnya kami sudah sampaikan untuk anggaran pokok-pokok pikiran DPRD jangan diganggu dulu. Sekarang kalau memang seperti Saya secara pribadi rela dan siap pikir saya dipangkas kapan perlu semua anggaran OPD dicloskan dan kita peruntukan untuk Covid-19. Dan setelah Covid-19 ini selesai dan benar-benar berakhir nanti kita rapat lagi dan menghitung berapa anggaran terpakai untuk Covid-19 dan berapa yang tinggal.

Rahman, S. Ag

- ✓ Sejak Covid-19 ini Pemerintah Daerah dan DPRD sama-sama punya tugas yang sangat berat, kami DPRD memahami tugas berat oleh TAPD tetapi anggota DPRD yang selalu berhubungan dengan masyarakat juga harus dipahami dan saya sebagai Ketua Fraksi tidak setuju anggaran pokok-pokok pikiran anggota DPRD di pangkas karena kita sama-sama punya tanggungjawab besar untuk masyarakat.

Hakimin, SH

- ✓ Untuk TAPD agar ini menjadi perhatian setelah dilihat di lapangan ada bantuan beras 5 kilo, dan kita rapat sudah 4 kali dan kejadian dilapangan orang kaya dikasih bantuan sementara yang miskin tidak dapat bantuan. Termasuk bantuan rumah tidak layak huni macam-macam terjadi dilapangan ada masyarakat punya rumah tapi tidak layak dikasih rumah, sekarang masyarakat rumah tidak ada tetapi tidak dikasih rumah.
- ✓ Untuk pikir anggota DPRD saya sepakat agar TAPD dapat mengamankan karena kami anggota DPRD banyak janji dengan konstituen.

Yoski Wandu, S. Pt, M. Si (Ka. Bappedalitbang)

- ✓ Pekerjaan yang dipangkas pekerjaan lama ketika surat penyesuaian pemotongan 179 milyar belum keluar, percayalah Pimpinan dan Anggota DPRD kami tidak mungkin kami ingin berselisih terus dengan DPRD. Ada tuduhan kita Pemerintah rapat-rapat terus kita ingin menyelesaikan pekerjaan memang harus rapat.
- ✓ Semua pekerjaan memang kami stop, lama penanganan Covid-19 karena ini prinsip ke hati-hatian kami TAPD memahami desakan konstituen anggota DPRD apalagi kita sama hidup dikampung. DAK semua tidak terlaksana. Untuk rumah tidak layak huni memang kita hapus karena kita tidak punya uang sehingga harus kita pangkas. Kalau pikir tidak bisa diambil saya angkat tangan. Karena terbatas APBD dan jumlah pendapatan yang sangat terbatas kalau memang seperti itu dengan sangat terpaksa kita tunda pembangunan mesjid terapung.

Dedi Rahmanto Putra, S. IP

- ✓ Apa yang disampaikan oleh Ka. Bappedalitbang kami paham, kami hanya ingin mengetahui dan kita harus punya keputusan hari ini. Untuk diketahui pikir tidak semua dalam bentuk fisik sebagian besar pikir untuk hibah dan sosial. Bagaimana kita lihat pikir anggota DPRD yang akan kita pangkas.
- ✓ Fungsi pengawasan DPRD sekarang ini sangat penting, sekarang ini minimal 15 % pikir harus bisa dilaksanakan karena saya lihat tidak satupun pikir anggota DPRD yang jalan pada hal pikir juga paket pemerintah bukan paket anggota DPRD, maka saya tidak setuju tidak satupun pikir anggota DPRD yang tidak jalan dan sekarang agar TAPD tentukan berapa persentase pikir anggota DPRD dapat dilaksanakan.

Novermal, SH

- ✓ Bantuan Covid-19 harus cepat tetapi pendataan juga belum selesai, kalau pikir tidak dapat dilaksanakan maka anggaran untuk fungsi pengawasan agar jangan dipangkas. Dan kami agar diberitahu seperti apa aksi plan Covid-19 oleh Pemerintah. Karena sampai sekarang APD di Puskesmas masih belum ada. Pada hal di Padang tenaga medis dikasih insentif.
- ✓ Maka saran saya untuk anggaran pengawasan DPRD jangan di otak atik, kalau anggaran Bimtek, Konsultasi silahkan.

Al Jufri, SH, MH

- ✓ Sampai sekarang APD belum lengkap, kalau kita lihat daerah tetangga Bengkulu sangat baik. Maka sekarang kita minta anggaran mana saja yang dipangkas dan kalau memang masih belum cukup silahkan diclos saja anggaran yang ada pada OPD.

Hamdi, S. Pt, M.Si (Asisten III Setda Kab. Pessel)

- ✓ Untuk pokir agar 15 % harus jalan kami juga tidak janji namun kami akan pelajari dulu dan untuk anggaran fungsi pengawasan kami akan pelajari kembali. Untuk tunjangan medis sudah kebijakan pusat dari BOK pada dinas kesehatan. Untuk JPS 80.000 KK dari 150.000.- KK janji pusat akan ada bantuan CSR dari perusahaan.

Dedi Rahmanto Putra, S.IP

- ✓ Yang terkontrak sebelum tanggal 9 lanjutkan dan terkontrak diatas tanggal 9 kita gagalkan atau menurut saya supaya adil pemangkasan ini sistem gelondongan saja. Karena saya lihat ada tebang pilih dan pilih di tebang oleh TAPD.

Alkisman, S. IP. Dt. Rj. Indo

- ✓ Kepala Bappedalitbang sudah sampaikan untuk kegiatan yang terkontrak tanggal 9 April tetap dibayarkan.

Mimi Riarti, SE, M.Si. Akt (Asisten II Setda Kab. Pessel)

- ✓ RTLH ada 5 milyar dari pokir dan kami ini setuju tetap dapat dilaksanakan. Bantuan dari pusat 2830 KK. Prov. 11337 KK, Kab. 16000 KK, 150000 KK dapat terbantu 80.000 KK. Pemerintah Daerah sudah menghimpun semua data miskin yang ada di Pesisir Selatan.

Dedi Rahmanto Putra, S. IP

- ✓ Anggaran RTLH dapat diakomodir, dan saya tanya apakah ini sudah jawaban TAPD atau Pemerintah atau bagaimana nanti jangan berubah lagi.
- ✓ Batasan kontrak dibawah tanggal 9 dibayar dan diatas tanggal 9 digagalkan. Dan anggaran Sekwan kondisi sekarang seperti apa. Semua anggaran tidak mungkin kita nolkan karena RTLH lanjut. Kontrak sebelum 9 April lanjut.

Jarizal, SE (Sekretaris DPRD Kab. Pessel)

- ✓ Pada kondisi sekarang anggaran Setwan awalnya 19 milyar dan dipotong 10 milyar dan anggaran dalam daerah untuk pengawasan masih ada.

Syafri Saputra, SH

- ✓ Dari anggaran 19 milyar sekarang untuk kegiatan DPRD berapa tinggal anggarannya.

Jarizal, SE (Sekretaris DPRD Kab. Pessel)

- ✓ Anggaran yang tinggal ada 2 milyar untuk kegiatan reses dan pembahasan ranperda sampai pada perubahan APBD.

Darwiadi, SH

- ✓ Masalah anggaran di Setwan diinternal DPRD masalah ini sudah agak booming, karena ada surat Inpres dan surat edaran Kemenkeu dan Kemendagri. Seperti yang disampaikan tadi sehingga semua kegiatan DPRD sudah dipangkas pada hal sesuai aturan kegiatan DPRD itu terdiri dari rapat dan koordinasi maka kalau semua anggaran ini dinolkan sama saja melumpuhkan DPRD. Kalaupun tidak kunjungan keluar kedalam tentu harus disediakan anggarannya. Kondisi ini agar jadi catatan kita bersama kalau hitung-hitungan sampai Juli boleh tetapi bagaimana setelah bulan Juli Covid-19 ini berakhir.
- ✓ Pertanyaan pada TAPD apakah ada potensi anggaran lain untuk menumbuhkan anggaran DPRD kembali jika kondisi ini pulih, kalau tidak kita harus seving juga anggarannya. Tetapi kalau memang kita nolkan saya juga tidak dapat bayangkan. Tapi kalau ada jalan lain mengsiasati kondisi ini tidak ada masalah ini saya sampaikan bukan berarti saya tidak sepakat dengan biaya untuk Covid-19 ini tetapi lebih pada ke hatiti-hatian kita, sehingga DPRD juga bisa melaksanakan tugas dan fungsi sesuai aturan yang ada.

Pimpinan Rapat (Ermizen, S. Pt)

- ✓ Karena azan berkumandang maka rapat diskor untuk sholat *dengan ketukan palu 1 kali*. Dan azan selesai maka rapat dilanjutkan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Hakim, SH *dengan ketukan palu 1 kali*.

Syafril Saputra, SH

- ✓ Hasil tinjauan lapangan tidak satupun nagari yang memotong anggaran nagari sesuai dengan aturan yang ada yang seperti 25 % atau 30 %. Untuk itu diminta pada TAPD mengevaluasi anggaran nagari agar pemotongan anggaran nagari sesuai Permendes karena semua masyarakat terdampak dengan Covid-19.

Alkisman, S. IP. Dt. Rj. Indo

- ✓ Pemotongan anggaran DPRD 10 milyar sementara kerja DPRD rapat dan koordinasi. Kalau bulan Mei Covid-19 selesai bagaimana anggaran selanjutnya. Saya kuatir Covid-19 habis anggaran DPRD tidak ada sehingga tidak melaksanakan tugas dan fungsi di daerah.

Hakimin, SH (Wakil Ketua DPRD)

- ✓ Untuk pemangkasan anggaran Setwan sebanyak 10 milyar saya tida tahu.

Alkisman, S. IP. Dt. Rj. Indo

- ✓ Kalau anggaran DPRD dipotong Pimpinan DPRD tidak tahu sudah keterlalu.

Dedi Rahmanto Putra, S.IP

- ✓ DPRD butuh ketegasan RTLH dapat dilaksanakan dan kontrak sebelum tanggal 9 lanjut dan persoalan anggaran perjalanan dinas DPRD tidak bisa bisa habis jika pandemi Covid-19 ini berakhir apakah TAPD punya anggaran lain untuk pengembalian Setwan.
- ✓ Minta TAPD tegas menjawabnya karena kami Komisi IV juga harus rapat dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Nakerstrans pukul 14.⁰⁰ Wib.

Jarizal, SE

- ✓ Saya sebagai Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD dan sesuai surat instruksi Bupati, dan kami sudah sampaikan ke Pimpinan sekitar 5 milyar setelah koordinasi dengan TAPD maka jadi 10 milyar.

Hakimin, SH

- ✓ Masalah pergeseran anggaran DPRD saya tidak mengetahui, dan saya adalah Wakil Ketua DPRD Pak Sekwan. Agar dijelaskan ke anggota DPRD.

Darwiadi, SH

- ✓ Rapat ini memang harus ada keputusan, maka ini ruangnya sekarang yang dimaksimalkan untuk membuat kesepakatan ini. Untuk pikir memang penting tetapi anggaran DPRD juga harus jelas. Mana tahu perubahan itu lama bulan September 2020. Dan contoh Padang yang dipotong itu belanja pengadaan kendaraan dinas Pimpinan DPRD bukan anggaran konsultasi DPRD. Sekarang permintaan kami apakah bisa minimal satu saja untuk konsultasi keluar. Saya menerima kegiatan lain yang kita alihkan dari pada kita biarkan lembaga ini lumpuh.
- ✓ Untuk menyelesaikan masalah saya kira jelas Sekwan tidak mampu dan ini sudah harus campur tangan Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi yang ada di DPRD.
- ✓ Sepengetahuan saya selama di DPRD tidak ada lagi forum yang setinggi ini karena ini rapat Pimpinan DPRD dan Ketua fraksi yang ada di DPRD. Dan kita perlu ada saling dengar mendengarkan antara TAPD dan DPRD kalau di DPR RI ini namanya rapat tingkat lobi Pimpinan DPRD dengan Pemerintah.

Julianavia, SH, M. Si

- ✓ Hasil tinjau lapangan anggota DPRD ke wilayah pemilihan beberapa hari lalu untuk bantuan beras yang diserahkan ke masyarakat kualitas kurang baik, dan pandemi Covid 19 ini belum tentu kapan berakhirnya walaupun ada ramalan para ahli mungkin Juli. Dan untuk bantuan kab, prov dan pusat sangat bervariasi jumlahnya, harapan masyarakat agar distribusi bantuan ini segera dilaksanakan karena masyarakat sudah menunggu.
- ✓ Masalah anggaran DPRD yang dilakukan pemangkasan oleh TAPD agar dipikirkan kembali sehingga tidak tumpang tindih terhadap pemotongan anggaran pada OPD.

Yoski Wandu, S. Pt, M. Si (Ka. Bappedalitbang)

- ✓ Pekerjaan di sistem sama Pemerintah dengan DPRD telah menyusun APBD, untuk anggaran RTLH dari pokok-pokok pikiran DPRD dapat kita lanjutkan dan saya sudah telpon Bupati kata Bapak Bupati silahkan kalau bisa. Untuk pergeseran anggaran OPD itu murni perintah surat Mendagri dan Kemenkeu dan untuk pengembalian anggaran DPRD saya minta agar dijelaskan oleh Kepala BPKD.

Darwiadi, SH

- ✓ Kami DPRD sebenarnya bukan butuh penjelasan tetapi kami tolong diberikan sedikit ruang, agar menyediakan anggaran minimal untuk 1 kali perjalanan pribadi mana tahu nanti ada undangan partai dan anggota DPRD mau pakai apa, dan kalau TAPD setuju biar Pimpinan melanjutkan negosiasi ini. Dari angka 10 milyar kan masih bisa diambil 500 juta dan permintaan ini agar dapat dipahami jangan ada nanti mengatakan DPRD tidak punya hati untuk penanggulangan pandemi Covid19 ini.
- ✓ Jaring pengaman sosial masih belum jelas untuk itu perlu diminta Pemerintah dengan gugusnya bekerja secara maksimal.

Hamdi, S. Pt, M.Si (Asisten III Setda Kab. Pessel)

- ✓ Untuk belanja modal dan belanja barang/jasa tidak mungkin lagi ada pengurangan bahkan. Karena untuk tahun ini kita devisa 30 milyar.

Dedi rahmanto Putra, S. IP

- ✓ Anggaran untuk luar provinsi DPRD minta satu termasuk anggaran dalam kabupaten. agar kita bicara jelas kalau seperti kata asisten III ideal pikir juga tetap jalan.

Novermal, SH

- ✓ Permintaan DPRD hanya minta satu kali perjalanan mana tahun ada panggilan DPP Partai.

Pimpinan Rapat (Hakimin, SH)

- ✓ Agar jawab pertanyaan sesuai yang disampaikan masalah lain-lain kita sudah paham, ini masalah tugas dan fungsi DPRD agar ini dijawab karena DPRD juga melaksanakan tugas.

Darwiadi, SH

- ✓ Awal pergeseran anggaran Setwan 5 milyar setelah itu menjadi 10 milyar saya rasa permintaan sangat masuk akal dari 10 milyar dicicilkan satu kali perjalanan sekitar 1 milyar kalau 10 milyar maka jadi 9 milyar semua aturan kita sudah baca. Dan permintaan itu untuk berjaga-jaga menjelang Perubahan. Seperti saya sampaikan tadi kalau DPRD Padang cuman yang diambil itu untuk pengadaan mobil Pimpinan dan DPRD Kabupaten Mukomuko dipangkas 3 milyar. Dan DPRD minta agar TAPD cari celah lain kalau tidak bisa DPRD siap dibarter dari pada pemangkasan untuk kegiatan DPRD silahkan pokok-pokok pikiran DPRD itu dihabiskan dan nanti kita lanjutkan pada tahun anggaran 2021.
- ✓ Pemerintah Daerah jangan berfikir DPRD bahwa DPRD dianggap menghabiskan uang daerah, tetapi DPRD ada karena ada aturan yang membuat seperti itu DPRD paham TAPD

berfikir keras tentang pergeseran anggaran ini tetapi jangan anggaran kegiatan DPRD di habiskan seperti itu.

Suhandri, SE, MM (Ka. BPKD)

- ✓ Kami akan panggil OPD mana tahu masih ada belanja lain yang bisa digunakan atau dipangkas, untuk Covid19 kita mencarikan uang sangat besar, sekarang kita sedang konsultasikan ke pusat kalau pusat tidak terima pergeseran ini maka kita akan yakinkan dari 65 milyar yang diminta pusat anggaran tersedia 40 milyar masih kurang 25 milyar.
- ✓ Kalau kita ingin cicilkan untuk satu kali perjalanan 1 milyar maka kami akan usahakan mana kegiatan yang bisa kita ambilkan untuk konsultasi pribadi ini.
- ✓ Sampai sekarang anggaran untuk Covid19 sudah terrealisasi \pm 3 milyar.

Darwiadi, SH

- ✓ Saya kira tidak perlu ditanggapi lagi biar TAPD yang akan memikirkan, namun sekarang ini juga perlu disampaikan semua anggaran sudah kita alihkan untuk Covid19 secara maksimal tetapi sampai sekarang APD di puskesmas masih kekurangan APD dan kita kuatir nanti mana tahu kalau lambat pengadaan APD pandemi Covid19 berakhir APD baru datang kan tidak bermanfaat seperti yang diharapkan. Setiap anggota DPRD turun ke bawah masyarakat minta semprot ini dan lainnya. TAPD panik dan kami DPRD juga lebih panik dengan dampak sosial dari Covid19 karena kami selalu berada dikeliling mereka di kampung.

Ucapan maaf pimpinan rapat jika ada kekeliruan selama memimpin rapat.

Dengan mengucapkan "*Alhamdulillah Rabbil'Alamin*" Pimpinan Rapat tutup rapat Jam 13.⁵⁰

Wib. Dengan ketukan palu 3 X kali.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Ketua,



ERMIZEN, S. Pd

